

## MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDAMPING PKH (PROGRAM KELUARGA HARAPAN) BERBASIS BLENDED LEARNING

Iwan Kurniawan<sup>1)</sup>, Oktaviani Wahyuningsih<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>SD Muhammadiyah 7 Bandung

<sup>2)</sup>Universitas Pendidikan Indonesia

Correspondence Email: [onekurnia@gmail.com](mailto:onekurnia@gmail.com)

### Abstract.

*This study aims to determine the description of training and education management PKH Based on Blended Learning in BBPPKS Bandung. The management of this training includes the planning, implementation, and evaluation stages. This research is a descriptive study with a qualitative approach. Data collection techniques in this study through interviews, document study, and observation. The validity of the data was checked by triangulation. The results showed that the training and education management PKH Based on Blended Learning includes: 1) Planning which includes analysis of training needs, preparation of training objectives, preparation of training plans, and preparation of administration; 2) The implementation of this training stage includes online learning, opening, offline learning and training closing; 3) Evaluation which consists of four forms of evaluation, namely evaluation of training participants, evaluation of lecturers, evaluation of the implementation of education and training and evaluation of post-training. In addition, training and education PKH Based on Blended Learning is also influenced by the availability of the internet network, the seriousness of the training participants, the mastery of technology owned by the participants, the PBL location, the readiness of the organizers, the completeness. infrastructure, and availability of costs.*

**Keyword:** Training and Education PKH, Blended Learning

### 1. PENDAHULUAN

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam perkembangannya memengaruhi dunia pendidikan semakin terasa sejalan dengan adanya pergeseran pola pembelajaran dari tatap muka yang dilakukan secara konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran. Bishop G. (1989) (dalam Wendhie Prayotno, 2015) meramalkan bahwa pendidikan masa mendatang akan bersifat luwes (*flexible*), terbuka, dan dapat diakses oleh siapapun juga yang memerlukannya tanpa memandang faktor jenis kelamin, usia, maupun pengalaman pendidikan sebelumnya

Dunia pendidikan di Indonesia di masa mendatang lebih cenderung berkembang pada bentuk pendidikan dan

pelatihan terbuka dengan menerapkan sistem pendidikan dan pelatihan jarak jauh (*distance learning*). Berbagi sumber belajar bersama antar lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan dalam sebuah jaringan, penggunaan perangkat teknologi informasi interaktif, seperti *CD-ROM* Multimedia, dalam pendidikan secara bertahap menggantikan Televisi dan Video serta memanfaatkan penggunaan teknologi internet secara optimal dalam pengembangan pembelajaran. Pembelajaran-pembelajaran yang dikembangkan cenderung akan menggabungkan pembelajaran konvensional dengan pembelajaran berbasis TIK (Wendhie Prayotno, 2015). Pembelajaran-pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran konvensional dengan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi itulah

yang dikembangkan sebagai pembelajaran campuran atau lebih dikenal dengan istilah *Blended Learning*.

*Blended learning* sudah mulai banyak digunakan dan populer di dunia pendidikan dan pelatihan beberapa tahun terakhir, salah satunya yaitu Diklat pendamping PKH di BBPPKS.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, penyelenggaraan Diklat pendamping PKH terdapat beberapa kendala. Merujuk pada permasalahan tersebut, pengelolaan Pelatihan berbasis *Blended Learning* perlu untuk ditelaah sehingga pelatihan dapat dilaksanakan secara optimal, Untuk pengelolaan pendidikan dan pelatihan diperlukan manajemen diklat. Manajemen yang dimaksud mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Pendidikan dan pelatihan pada umumnya merupakan serangkaian kegiatan yang dipersiapkan organisasi untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Seperti yang diungkapkan Hasan Basri dan Rusdiana (2018, hlm. 29) bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan sumber daya manusia, terutama untuk pengembangan aspek kemampuan dan intelektual.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan harus dikelola dengan baik mulai dari adanya kegiatan, identifikasi kebutuhan, perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, hingga evaluasi secara sistematis agar tujuan diklat dapat tercapai. Kegiatan pengelolaan tersebut disebut dengan manajemen. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Soepardi (dalam Nur Aedi, 2012, hlm. 25) bahwa manajemen adalah keseluruhan proses kegiatan-kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok atau lebih orang-orang secara bersama-sama dan simultan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Manajemen pelatihan sebagai suatu proses, menurut Davies (dalam Hasan dan Rusdiana, 2018, hlm. 98) istilah manajemen pelatihan atau pengelolaan pelatihan berkaitan dengan trisula aktivitas yakni perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal

senada juga dikemukakan oleh Arismunandar dan Ratnawati (2007, hlm. 1) mengemukakan bahwa semua kegiatan diklat didesain dalam beberapa tahap berdasarkan fungsi dari manajemen yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tersebut merupakan komponen daur manajemen pelatihan. Daur manajemen tersebut merupakan “pendekatan pelatihan sistematis” yang dapat dijabarkan kedalam sepuluh langkah kegiatan.

Daryanto (2014, hlm. 117) menjelaskan mengenai prosedur pengelolaan pelatihan secara hierarkis dapat diuraikan sebagai berikut:

Langkah 1 : Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Pelatihan

Langkah 2 : Menguji dan Analisis Jabatan dan Tugas Langkah

Langkah 3 : Klasifikasi dan Menentukan Peserta Pelatihan

Langkah 4 : Rumuskan Tujuan Pelatihan

Langkah 5 : Pendesainan Kurikulum dan Silabus Pelatihan

Langkah 6 : Perencanaan Program Pelatihan

Langkah 7 : Penyusunan dan Pengembangan Kerangka Acuan

Langkah 8 : Pelaksanaan Program Pelatihan

Langkah 9 : Evaluasi Program Pelatihan

Langkah 10 : Tindak Lanjut Pelatihan

*Blended learning* sudah mulai banyak digunakan dan populer di dunia pendidikan dan pelatihan beberapa tahun terakhir. Menurut Dziuban (dalam Husamah, 2014) *Blended learning*, *hybrid learning* dan *mixed mode learning* adalah sesuatu istilah yang memiliki maksud sama. *Blended learning* juga biasa disebut *hybrid learning*, karena memadukan keunggulan-keunggulan yang dimiliki model pembelajaran tradisional dan manfaat-manfaat yang ada pada pembelajaran *online* dalam menyajikan pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik serta mampu menyesuaikan karakteristik dan kebutuhannya. Peserta didik yang

sebelumnya hanya mendapat pembelajaran konvensional berbasis tatap muka dengan segala keterbatasannya, maka dengan *blended learning* peserta didik akan mampu meningkatkan kualitas pembelajarannya melalui setiap karakteristik positif pembelajaran *online*.

Diklat pendamping PKH merupakan model pelatihan yang khusus, karena muatan pembelajarannya lebih mengedepankan unsur praktik yang mencapai prosentase 80%. Oleh karenanya, selain berisi muatan praktik indoor di kelas-kelas kecil, juga praktik outdoor di lingkungan masyarakat pada titik lokasi (lokus) tertentu yang telah di tentukan. Praktik outdoor dimaksud adalah kegiatan Praktik Belajar Lapangan (PBL) Diklat Pendamping PKH.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Melalui Sistem Pembelajaran secara Elektronik bahwa “untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan dan pencapaian sasaran pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial, perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi informasi”.

Metode penyelenggaraan Diklat Pendamping PKH yaitu *Blended Learning*, yaitu penggabungan antara proses pembelajaran daring (dalam jaringan) dan Luring (offline), serta Praktik Belajar Lapangan. Tahapan pembelajaran daring dilakukan terlebih dahulu sebagai pengetahuan awal dan pemberian pengetahuan kognitif dan psikomotorik kepada peserta diklat.

## 2. METODE PENELITIAN

Desain penelitian adalah rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan tujuan penelitian (Nasution, 2009, hlm. 23). Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menggambarkan bagaimana manajemen pendidikan dan pelatihan pendamping PKH berbasis *blended learning* di BBPPKS

Bandung, maka desain penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif yang diperoleh melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang suatu gejala saat penelitian dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini merupakan proses manajemen pendidikan dan pelatihan yang dilakukan melalui kajian terhadap perilaku dari para pelaku yang terlibat. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah data yang berupa kata-kata atau kalimat yang kemudian ditarik suatu kesimpulan. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau hubungan antar variabel.

Partisipan pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini mempertimbangkan subjek yang mengetahui mengenai manajemen pendidikan dan pelatihan. Partisipan dipilih saat peneliti mulai memasuki lapangan hingga penelitian berlangsung, dengan pertimbangan bahwa mereka mengetahui dan terlibat dalam Penyelenggaraan Diklat Pendamping PKH berbasis *Blended Learning* di BBPPKS Bandung.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, dan informasi yang dapat dipercaya tentang manajemen pendidikan dan pelatihan pendamping PKH di BBPPKS Bandung. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Untuk memudahkan pengolahan data temuan penelitian ini peneliti menggunakan perangkat lunak yang dikhususkan untuk mengolah data dan informasi pada metodologi kualitatif. Peneliti merencanakan pengolahan data kualitatif dengan menggunakan QSR NVIVO. Tahapan-tahapan pengolahan data hasil temuan penelitian menggunakan Nvivo 12:

Iwan Kurniawan, Oktaviani Wahyuningsih

Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan Pendamping Pkh (Program Keluarga Harapan) Berbasis *Blended*

- a) Input data dan mengorganisasikan data
- b) Pengelompokan berdasarkan kategori permasalahan dan pola jawaban
- c) Menguji ketepatan antara permasalahan yang ada terhadap data
- d) Visualisasi data

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Diklat pendamping PKH berbasis *Blended Learning* merupakan upaya yang dilakukan lembaga atau unit organisasi untuk memenuhi kompetensi pendamping PKH agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pendamping PKH untuk mensukseskan program PKH (Program Keluarga Harapan). Adanya kompetensi yang harus dicapai dan dipenuhi maka konsep pendidikan dan pelatihan Diklat Pendamping PKH sejalan dengan Hasan Basri dan Rusdiana (2018, hlm. 29) bahwa ‘pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan sumber daya manusia, terutama untuk pengembangan aspek kemampuan dan intelektual’.

Secara umum pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Pendamping PKH Berbasis *Blended Learning* ini diawali dengan tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Seperti menurut Davies (dalam Hasan dan Rusdiana, 2018, hlm. 98) istilah manajemen pelatihan atau pengelolaan pelatihan berkaitan dengan trisula aktivitas yakni perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal senada juga dikemukakan oleh Arismunandar dan Ratnawati (2007, hlm. 1) mengemukakan bahwa semua kegiatan diklat didesain dalam beberapa tahap berdasarkan fungsi dari manajemen yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Dalam kegiatan diklat Pendamping PKH berbasis *blended learning* di BBPPKS Bandung diawali dengan tahap perencanaan yang meliputi kegiatan: analisis kebutuhan diklat, merumuskan tujuan diklat, menyusun rencana pelatihan, dan persiapan administrasi.

Kegiatan tersebut hampir sejalan dengan kegiatan yang dikemukakan oleh Hasan Basri dan Rusdiana (2018, hlm. 98) yang menyatakan bahwa perencanaan suatu diklat atau pelatihan adalah menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam pelatihan (*course training objectives*) dan merupakan petunjuk atau arahan tentang waktu pelaksanaan dan cara pelatihan dilaksanakan serta peserta pelatihan, yang disahkan oleh pejabat yang berwenang menangani masalah diklat, khususnya masalah yang menyangkut anggaran, waktu, dan sasaran yang ingin dicapai.

Tahap kedua dalam Manajemen Diklat Pendamping PKH Berbasis *Blended Learning* adalah tahap pelaksanaan. Pelaksanaan diklat pada umumnya meliputi tiga tahapan yaitu pembukaan diklat, kegiatan belajar mengajar dan penutupan diklat. Sejalan dengan hal tersebut, Daryanto dan Bintaro (2004, hlm. 114) mengemukakan bahwa pelaksanaan diklat dibagi tiga yaitu pembukaan, kegiatan inti dan penutup. Namun berbeda dengan Diklat Pendamping PKH Berbasis *Blended Learning* adapun kegiatan dalam tahap pelaksanaan diklat ini meliputi: pembelajaran daring, pembukaan, pembelajaran luring dan penutupan diklat.

Dalam pelaksanaan pembelajaran Diklat Pendamping PKH berbasis *Blended Learning* ini, pembelajaran daring merupakan syarat terselenggaranya pembelajaran tatap muka. Hal tersebut sejalan dengan Adam dan Morgan (dalam Miksan Ansori, 2018) “Model II *blended learning* Model ini menyeimbangkan *online learning* dan *classroom instruction*. *Online learning* digunakan sebagai syarat terselenggaranya pembelajaran tatap muka atau sebaliknya. Hasil belajar dari model ini sangat ditentukan oleh beberapa hal. Misalkan, aktivitas pra-pembelajaran dapat menjadikan peserta didik lebih siap dalam kegiatan belajar-mengajar sedangkan aktivitas pasca pembelajaran dapat memperdalam pemahaman dan memperluas pengetahuan tentang materi pembelajaran yang telah diberikan”.

Tahap terakhir dari Manajemen Diklat Pendamping PKH Berbasis Blended Learning adalah tahap evaluasi untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari diklat tersebut. Hal tersebut sejalan dengan Stufflebeam & Shinkfield (dalam Hasan dan Rusdiana, 2018, hlm. 107) sangat penting untuk mengetahui berbagai kekurangan, kelemahan, dan kelebihan, baik pada pihak penyelenggara pelatihan maupun proses yang terjadi. Secara teoritis evaluasi menurut Brinkerhoff (dalam Widoyoko, 2009, hlm. 4) merupakan proses yang menentukan sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai. Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan dan menyajikan informasi tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya.

Evaluasi Diklat Pendamping PKH terdiri dari empat bentuk evaluasi yaitu evaluasi peserta diklat, evaluasi widyaiswara, evaluasi penyelenggaraan diklat dan evaluasi pasca diklat. Hal tersebut sejalan dengan Atmodiwirio (2005, hlm. 270) sasaran evaluasi pendidikan dan pelatihan adalah mencakup peserta, program penggunaan personal, sarana dan prasarana, biaya tamatan, partisipasi pelanggan dan masyarakat.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil temuan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara umum pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Pendamping PKH Berbasis *Blended Learning* sudah terlaksana dengan baik melalui beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Manajemen Diklat Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) Berbasis *Blended Learning* meliputi: 1) Perencanaan penyelenggaraan yang di antaranya adalah analisis kebutuhan diklat, merumuskan tujuan

diklat, menyusun rencana pelatihan, dan persiapan administrasi; 2) Pelaksanaan penyelenggaraan tahap pelaksanaan diklat ini meliputi pembelajaran daring, pembukaan, pembelajaran luring dan penutupan diklat; 3) Evaluasi penyelenggaraan, yang terdiri dari empat bentuk evaluasi yaitu evaluasi peserta diklat, evaluasi widyaiswara, evaluasi penyelenggaraan diklat dan evaluasi pasca diklat. Selain itu Diklat Pendamping PKH Berbasis *Blended Learning* ini juga dipengaruhi oleh kesediaan jaringan internet, kesungguhan peserta diklat, penguasaan teknologi yang dimiliki peserta, lokasi PBL, kesiapan penyelenggara, kelengkapan sarana prasarana, serta ketersediaan biaya.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, S. (2013). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Atmodiwirio, S. (2005). *Manajemen Pelatihan*. Jakarta: PT Ardadizya Jaya
- Basri, H. & Rusdiana (2015). *Manajemen Pendidikan dan Pelatihan*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Daryanto & Bintoro. (2014). *Manajemen DIKLAT*. Yogyakarta: Gava Media
- Farida, I. (2010). *Manajemen Pengembangan Pegawai*. Bandung: Unpad Press
- Fauzi, I. K. A. (2011). *Mengelola Pelatihan Partisipatif*. Bandung: Alfabeta
- Gintings, A. (2011). *Manajemen Pendidikan dan Pelatihan*. Bandung: Humaniora
- Kamil, Mustofa. (2010). *Model Pendidikan dan Pelatihan*. Bandung: Alfabeta.
- Kaswan. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Garaha Ilmu.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan*

- Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Siagian, P. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sudjana, Djuju. (2008). *Sistem dan Manajemen Pelatihan*. Bandung: Falah Production.
- Sutrisno, E. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana
- Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan. (2010). *Pengelolaan Pendidikan*. Bandung: Jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Melalui Sistem Pembelajaran secara Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 39/HUK/2003 tentang Kebijakan dan Program Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial
- Keputusan Menteri Sosial RI No. 53/HUK/2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS)
- Ansori Miksan. (2018). “*Desain dan Evaluasi Pembelajaran Blended Learning Berbasis Whatsapp Group (WAG)*”. [Online]. Tersedia: <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah/article/view/56>
- Munandar & Ratnawati. (2007). “*Peningkatan Profesional Guru Melalui Pendidikan Dan Latihan*”. [Online]. Tersedia: <http://www.digilib.unm.ac.id/.../universitas%20negeri%20m akasar>. [2 Maret 2013].
- Prayitno Wendhie. (2015). “*Penerapan Blended Learning Dalam Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (PTK)*”. [Online]. Tersedia: [lmpjogja.kemdikbud.go.id > 2015/08](http://lmpjogja.kemdikbud.go.id/2015/08)
- Ruhyat Yayat. (2019). “*Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah Di Balai Diklat Keagamaan*”. [Online]. Tersedia: <https://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/view/24827>
- Sancoko, Bambang dan Hasan Ashari. (2018). “*Implementasi Model Pembelajaran Blended E-Learning Pada Diklat Pengadaan Barang/Jasa di BPPK*”. [Online]. Tersedia: <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/257>
- Maryani Ana. (2017). “*Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV dengan Pola Baru Di Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah IV Bandung*”. [Online]. Tersedia: <http://repository.upi.edu/31142/>
- Pasaribu, Y. (2015). “*Manajemen Pendidikan dan Pelatihan di Learning Center PT Pos Indonesia*”. [Online]. Tersedia: <http://repository.upi.edu/21900/>

